

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen resmi berupa laporan keuangan memuat informasi terkait keadaan serta hasil kinerja keuangan suatu entitas dalam kurun waktu tertentu, yang kemudian dijadikan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti pemilik, penanam modal, maupun pihak-pihak luar lainnya dalam proses pengambilan keputusan (Azhari & Lenggogeni, 2024). Penyajian laporan keuangan secara andal dan dapat dipertanggungjawabkan memiliki peran krusial dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan, karena mampu menunjukkan keseluruhan kondisi finansial perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga menjadi alat utama dalam mengevaluasi keberhasilan strategi bisnis yang dijalankan perusahaan serta bagaimana perusahaan mengelola sumber dayanya untuk mencapai tujuan bisnis.

Laporan keuangan tidak hanya menyajikan aspek keuangan saja tetapi juga menggambarkan strategi perusahaan, efisiensi operasional, dan kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan kondisi pasar (Oktavia & Rinaldo, 2023). Oleh karena itu, untuk membangun kepercayaan, laporan keuangan digunakan sebagai komunikasi utama antara perusahaan dan pihak-pihak berkepentingan (Sari dkk., 2022). Dengan demikian, penyajian laporan keuangan secara transparan dapat meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dan investor, karena investor lebih yakin untuk menanamkan

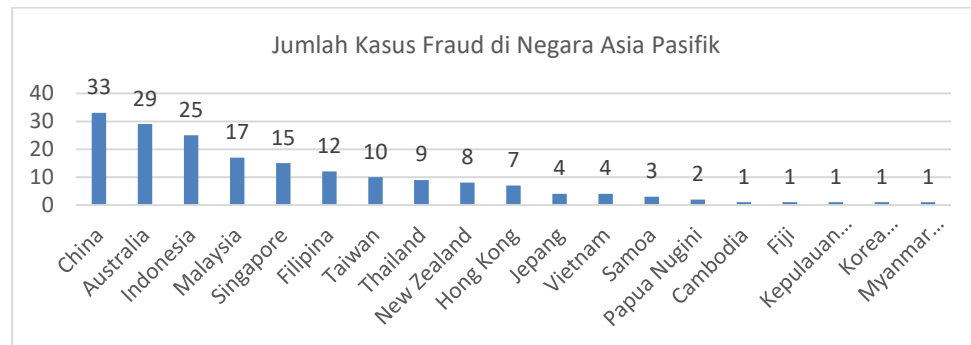
modalnya ketika mereka mendapatkan data yang transparan dan dapat diandalkan.

Penyajian laporan keuangan wajib mencerminkan kondisi riil perusahaan, agar setiap keputusan yang nantinya dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dapat menghasilkan dampak positif untuk keberlangsungan perusahaan di masa depan (Sihombing & Panggulu, 2022). Pengambilan keputusan yang mengacu pada laporan keuangan yang andal dan berkualitas mampu membantu perusahaan dalam merumuskan strategi bisnis yang lebih akurat. Sebaliknya, jika laporan keuangan disajikan secara manipulatif dapat menyebabkan pemangku kepentingan mengambil keputusan yang salah. Akibatnya, perusahaan bisa mengalami kerugian dalam jangka panjang.

Penyusunan laporan keuangan secara tepat memiliki peran krusial, karena apabila terjadi kecurangan dalam proses pelaporannya, maka akan memberikan dampak buruk untuk perusahaan, seperti hilangnya kepercayaan investor, rusaknya reputasi perusahaan, kerugian, atau bahkan terancam kebangkrutan (Oktavia & Rinaldo, 2023). Perusahaan yang memanipulasi laporan keuangannya akan menghadapi konsekuensi hukum yang berat, seperti denda besar atau pencabutan izin usaha, sehingga kondisi seperti ini yang semakin memperburuk kondisi perusahaan. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan perlu dilakukan secara tepat, relevan, serta dapat dipercaya, agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan (Hardirmaningrum & Rohman, 2023).

Realita mengatakan bahwa sebagian besar manajemen perusahaan yang belum memahami urgensi dalam menjaga integritas laporan keuangan tetap terjaga dan terbebas dari praktik penyimpangan (Apriwenni dkk, 2023). Laporan keuangan yang curang dapat terjadi apabila perusahaan memiliki situasi ekonomi yang menurun serta dibarengi dengan tekanan yang muncul dari pemilik untuk mencapai target kinerja (Arum & Wahyudi, 2024). Tekanan dari pemilik perusahaan untuk mendapatkan kesan yang bagus dari pemangku kepentingan sering kali menimbulkan perilaku manajemen yang tidak etis, seperti memanipulasi pendapatan atau penghilangan kewajiban (Kirana dkk., 2023). Selain itu, lemahnya sistem pengendalian internal dan kelalaian pengawasan dari auditor juga menjadi faktor pendukung terjadinya tindak kecurangan, yang pada akhirnya mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak merepresentasikan kondisi perusahaan secara nyata (Sugiarti, 2024).

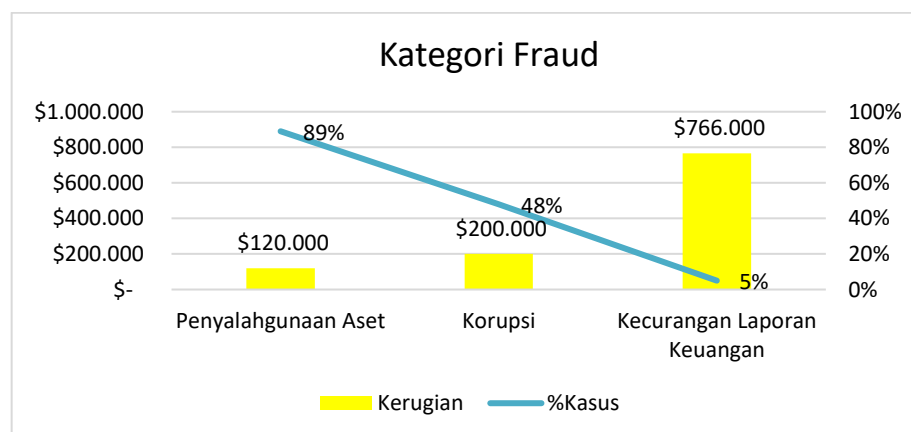
Tindakan kecurangan merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan niat sengaja menyampaikan informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai fakta untuk mendapatkan keuntungan pribadi (Sugiarti, 2024). *Fraud* ini menjadi permasalahan berskala global karena berdampak di berbagai organisasi di semua wilayah dan sektor industri (ACFE, 2024). Fenomena ini tercermin dari tingginya jumlah kasus kecurangan yang tercatat di sejumlah negara dalam kawasan Asia Pasifik, sebagaimana ditunjukkan dalam data berikut:



Gambar 1. 1 Jumlah Kasus *Fraud* di Negara Asia Pasifik

Sumber: ACFE (2024), Diolah Peneliti

Berdasarkan gambar 1.1, tercatat sebanyak 183 kasus kecurangan yang terjadi selama periode 2022 hingga 2023 di wilayah Asia Pasifik. Negara dengan jumlah kasus tertinggi adalah China, yang mencatatkan 33 kasus *fraud*. Sementara itu, jumlah kasus terendah masing-masing hanya satu kasus terjadi di Cambodia, Fiji, Myanmar (Burma), Kepulauan Solomon, dan Korea Selatan. Adapun Indonesia menempati urutan ketiga dengan total 25 kasus kecurangan. Data ini mengindikasikan bahwa Indonesia berada dalam negara yang memiliki tingkat kasus *fraud* yang relatif tinggi.



Gambar 1. 2 Kategori *Fraud*

Sumber: ACFE (2024), Diolah Peneliti

Berdasarkan gambar 1.2, jenis kecurangan dengan persentase tertinggi adalah penyalahgunaan aset sebesar 89%, meskipun kasusnya tergolong tinggi tetapi nilai kerugiannya justru berada pada posisi terendah, yaitu sekitar \$120.000. Di urutan kedua terdapat tindak korupsi dengan persentase sebesar 48% dan nilai kerugian rata-rata mencapai \$200.000. Sementara itu, laporan keuangan yang curang merupakan jenis yang paling jarang terjadi dengan persentase hanya 5%. Namun, meskipun frekuensinya rendah, jenis *fraud* ini mengakibatkan kerugian rata-rata paling besar, yaitu mencapai \$766.000 (ACFE, 2024).

Menurut ACFE (2024), Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam jumlah kasus *fraud* tertinggi di Negara Asia Pasifik pada tahun 2022-2023. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan perhatian khusus terhadap pencegahan *financial statement fraud*. Meskipun kasusnya memiliki persentase yang kecil namun dampak kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Kerugian ini tidak hanya merugikan para pemangku kepentingan tetapi juga berdampak negatif pada citra perusahaan.

Laporan keuangan yang curang adalah tindakan secara sadar untuk merekayasa dengan menampilkan data yang menyimpang dari kondisi sebenarnya (Bifadli dkk., 2023). Tujuan dari tindakan tersebut agar para pengguna laporan keuangan tertipu pada informasi yang disampaikan oleh perusahaan (Hardirmaningrum & Rohman, 2023). Salah satu alasan manajemen melakukan tindakan tersebut adalah untuk mewujudkan harapan investor yang menginginkan kinerja perusahaan terus mengalami peningkatan (Apriwenni

dkk., 2023). Akibatnya, manajemen cenderung mengambil berbagai tindakan agar laporan keuangan tampak menarik di mata investor serta dapat mempertahankan reputasi perusahaan.

Salah satu kasus terkini terkait kecurangan dalam pelaporan keuangan di Indonesia terjadi pada perusahaan manufaktur PT Indofarma. Awal mula kasus ini terkuak pada saat BPK melakukan audit ulang terhadap pengelolaan pendapatan, beban, dan kegiatan investasi dalam laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas periode Tahun 2020 hingga Semester I Tahun 2023 pada PT Indofarma, beserta entitas anak dan lembaga terkait. Dari hasil audit tersebut, BPK menemukan bahwa PT Indofarma dan anak perusahaan melakukan penyimpangan hingga merugikan negara sebesar Rp371,8 miliar (CNBC Indonesia, 2024). Kecurangan laporan keuangan yang dilakukan PT Indofarma beserta anak perusahaannya yaitu PT Indofarma Global Medika (PT IGM) melibatkan tiga orang petinggi di perusahaan tersebut yaitu, Direktur Utama PT Indofarma tahun 2019-2023, Direktur PT IGM tahun 2020-2023, dan *Head of Finance* PT IGM tahun 2019-2021 (Detik News, 2024). Beberapa bentuk kecurangan yang telah dilakukan yang pertama, membuat penjualan fiktif dengan membuat piutang agar seolah-olah target perusahaan terpenuhi. Kedua, membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor sehingga seolah-olah pendapatan perusahaan meningkat. Ketiga, mengupayakan sumber pendanaan di luar perbankan guna memenuhi operasional PT Indofarma dan PT IGM. Namun, dana tersebut dititipkan kepada pihak vendor dengan alasan adanya kesalahan transfer, yang nyatanya dipakai untuk kepentingan pribadi. Keempat,

membuat unit baru yaitu *Fast Moving Consumer Goods* (FMGG) untuk melakukan transaksi fiktif (Detik News, 2024). Hingga saat ini, proses penyelidikan atas kasus ini masih terus berlangsung.

Kasus manipulasi laporan keuangan tidak hanya ditemukan pada PT Indofarma, melainkan juga terjadi pada anak perusahaan dari PT Kimia Farma (KAFE), yaitu PT Kimia Farma Apotek (KFA). Kasus kecurangan ini terungkap setelah dilakukan audit internal yang menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyajian data keuangan pada periode 2021-2022. Awal mula kasus ini terkuak dari adanya indikasi penggelembungan data terkait distribusi dan penjualan yang dilaporkan lebih tinggi dari kondisi sebenarnya untuk memberikan kesan performa keuangan yang baik (Liputan 6, 2024). Dari hasil audit, menunjukkan bahwa tindakan manipulasi ini berdampak signifikan terhadap keuangan perusahaan dengan kerugian KAEF secara konsolidasi mencapai Rp 1,82 triliun pada tahun 2023. Selain itu, beban usaha KFA juga meningkat hingga 35,53 persen secara tahunan menjadi Rp 4,66 triliun (CNN Indonesia, 2024). Namun hingga saat ini, pihak-pihak yang terlibat serta bentuk kecurangan yang lain masih belum diungkap secara rinci karena proses investigasi masih berlangsung.

Kasus yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa sektor manufaktur termasuk salah satu sektor yang sangat rentan terhadap risiko kecurangan. Dibuktikan dalam laporan ACFE (2024) yang menunjukkan bahwa sektor manufaktur menduduki peringkat kedua dalam kategori perusahaan yang paling sering terkena kasus kecurangan yaitu sebesar 175 kasus, serta peringkat ketiga

perusahaan yang mengalami kerugian terbesar akibat kecurangan. Sektor manufaktur sendiri merupakan sektor yang mengubah material dasar menjadi produk akhir melalui tahapan produksi yang panjang dan kompleks, berawal dari pengadaan bahan baku, kegiatan pengolahan, hingga pendistribusian dan pemasaran produk. Setiap tahapan tersebut melibatkan banyak pihak dan aktivitas, sehingga menciptakan celah yang rentan terhadap terjadinya tindak kecurangan. Selain menjadi sektor yang rawan terhadap kecurangan, sektor manufaktur juga memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan industri dan meningkatkan nilai ekspor (Portal Informasi Indonesia, 2024). Oleh karena itu, perusahaan manufaktur menjadi objek penelitian yang relevan dan tepat untuk menguji pengaruh elemen elemen dalam *fraud hexagon* terhadap potensi terjadinya *fraudulent financial statement*.

Meningkatnya kasus kecurangan mendorong para ahli untuk terus mengembangkan pendekatan teoretis terkait tindakan *fraud*. Teori awal mengenai *fraud* diperkenalkan oleh Cressey pada tahun 1953 yang melalui konsep *fraud triangle*, yang menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga unsur utama, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Kemudian pada tahun 2004, Wolfe dan Hermason menyempurnakan pendekatan tersebut dengan menghadirkan teori *fraud diamond*, melalui penambahan unsur kapabilitas sebagai factor keempat. Selanjutnya, pada tahun 2011, Crowe Howarth memperluas teori ini dengan menambahkan unsur arogansi menjadi *fraud pentagon*. Terakhir, di tahun 2019, Vousinas Kembali mengembangkan

teori ini menjadi *fraud hexagon* dengan menyertakan unsur kolusi sebagai elemen tambahan. Vousinas berpendapat bahwa kasus kecurangan yang sering terjadi dikarenakan karena adanya kolusi atau perjanjian antara berbagai pihak (Wilantari & Ariyanto, 2023). Dari penyempurnaan teori *fraud* tersebut, teori *fraud hexagon* akan digunakan untuk penelitian ini. *Fraud hexagon* mencakup enam komponen utama yaitu *stimulus* (tekanan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi), *capability* (kemampuan), ego, dan *collusion* (kolusi).

Stimulus atau tekanan adalah faktor pertama dari teori *fraud hexagon* yang diproksikan dengan *financial target* (Sihombing & Panggulu, 2022). *Financial target* adalah pencapaian tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memperoleh laba dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Sihombing & Panggulu, 2022). Jika manajemen berhasil mencapai target tersebut maka manajemen dapat memperoleh imbalan. Namun jika target tersebut tidak dapat tercapai maka akan timbul tekanan pada diri manajemen untuk melakukan Tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Makaryanawati, 2023). Penelitian *financial target* terhadap laporan keuangan yang curang oleh Sihombing & Panggulu (2022) menunjukkan adanya pengaruh. Sementara penelitian Achmad dkk (2022) tidak menunjukkan pengaruh.

Opportunity atau peluang adalah faktor kedua dari teori *fraud hexagon* yang diproksikan dengan *ineffective monitoring* (Sukmadilaga dkk, 2022). *Ineffective monitoring* adalah pengawasan yang tidak efektif dalam suatu perusahaan akibat sistem pengendalian internal yang lemah (Bifadli dkk., 2023).

Kurangnya sistem pengendalian yang ketat dapat menyebabkan manajemen merasa tidak diawasi, sehingga memberikan peluang untuk manajemen dalam melakukan *fraudulent financial statement* (Handoko, 2021). Penelitian *Ineffective Monitoring* terhadap laporan keuangan yang curang oleh Sukmadilaga dkk (2022) menunjukkan adanya pengaruh. Sementara penelitian Bifadli dkk (2023) tidak menunjukkan pengaruh.

Rationalization atau rasionalisasi adalah faktor ketiga dari teori *fraud hexagon* yaitu yang diproksikan dengan *change in auditor* (Kirana dkk, 2023). Auditor merupakan salah satu pihak yang memiliki keahlian khusus dalam meninjau laporan keuangan maupun segala informasi termasuk tindak kecurangan di suatu perusahaan (Larum dkk., 2021). Oleh karena itu, manajemen sering kali melakukan pergantian auditor sebagai upaya untuk menyembunyikan kecurangan yang telah terjadi. Frekuensi pergantian auditor yang terlalu tinggi oleh sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa adanya tindakan pada laporan keuangan yang curang (Larum dkk., 2021). Penelitian terkait *change in auditor* terhadap *fraudulent financial statement* oleh Kirana dkk (2023) menunjukkan bahwa *change in auditor* berpengaruh terhadap laporan keuangan yang curang menunjukkan adanya pengaruh. Sementara penelitian Ahcmad dkk (2022) tidak menunjukkan pengaruh.

Capability atau kemampuan adalah faktor keempat dari teori *fraud hexagon* yang diproksikan dengan *change in director* (Larum dkk, 2021). *Change in director* adalah perubahan pimpinan dalam suatu perusahaan yang dapat terjadi akibat jabatan telah berakhir maupun karena penghentian paksa akibat

tindakannya yang merugikan perusahaan (Bifadli dkk., 2023). Pergantian direktur ini sering kali menghambat kinerja perusahaan, sebab direktur baru biasanya membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan perusahaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan *stress period* bagi karyawan yang pada akhirnya berpotensi mendorong tindakan kecurangan. Kondisi ini muncul Ketika mereka mencoba memanfaatkan keadaan Perusahaan yang belum stabil (Bifadli dkk., 2023). Penelitian terkait *change in director* terhadap kecurangan laporan keuangan yang curang oleh Larum dkk (2021) menunjukkan adanya pengaruh. Sementara penelitian Arum & Wahyudi (2024) tidak menunjukkann pengaruh.

Ego adalah faktor kelima dari teori *fraud hexagon* yang diproksikan dengan *family firms* (Makaryanawati, 2023). *Family firms* atau perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, dan diawasi oleh sejumlah anggota keluarga, serta melibatkan partisipasi dari generasi penerusnya (Makaryanawati, 2023). Perusahaan keluarga cenderung memiliki ego yang tinggi karena adanya keinginan agar perusahaan mereka dikenal luas dan diakui sebagai perusahaan yang sukses oleh banyak orang. Kondisi ini dapat menimbulkan adanya tindak kecurangan dalam laporan keuangan guna menampilkan kondisi perusahaan yang sehat demi menarik investor dan memberikan keuntungan bagi pemilik. Perusahaan yang seluruh kendali dan pengawasannya berada dalam lingkup keluarga akan mempermudah melakukan tindak kecurangan karena kurang efektifnya pengawasan internal dalam perusahaan (Situngkir & Triyanto, 2020). Penelitian terkait *family firms*

terhadap laporan keuangan yang curang oleh Situngkir & Triyanto (2020) menunjukkan adanya pengaruh. Sementara penelitian Makaryanawati (2023) tidak menunjukkan pengaruh.

Collusion atau kolusi adalah faktor keenam dari teori *fraud hexagon* yang diproksikan dengan *state-owned enterprises* (Wilantari & Ariyanto 2023). *State-owned enterprises* adalah perusahaan yang mayoritas kepemilikan sahamnya berada di bawah kendali pemerintah (Sagala & Siagian, 2021). Perusahaan yang dikuasai oleh negara memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya adalah akses yang lebih mudah terhadap sumber pembiayaan serta dukungan keuangan ketika perusahaan mengalami tekanan atau kesulitan operasional, sehingga pihak perusahaan memanfaatkannya untuk melakukan manipulasi dalam pelaporan keuangan (Bifadli dkk., 2023). Penelitian terkait *state-owned enterprises* terhadap laporan keuangan yang curang oleh Wilantari & Ariyanto (2023) menunjukkan adanya pengaruh. Sementara penelitian Wulandari & Ali (2023) tidak menunjukkan pengaruh.

Berdasarkan uraian fenomena serta latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, serta mempertimbangkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang memperlihatkan hasil yang belum konsisten, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Fraud Hexagon* Terhadap *Fraudulent Financial Statement* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2021-2023)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah *financial target* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*?
- b. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*?
- c. Apakah *change in auditor* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*?
- d. Apakah *change in director* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*?
- e. Apakah *family firms* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*?
- f. Apakah *state-owned enterprises* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menguji pengaruh *financial target* terhadap *fraudulent financial statement*

- b. Menguji pengaruh *innevective monitoring* terhadap *fraudulent financial statement*
- c. Menguji pengaruh *change in auditor* terhadap *fraudulent financial statement*
- d. Menguji pengaruh *change in director* terhadap *fraudulent financial statement*
- e. Menguji pengaruh *family firms* terhadap *fraudulent financial statement*
- f. Menguji pengaruh *state-owned enterprises* terhadap *fraudulent financial statement*

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan mengenai berbagai aspek yang dapat memicu terjadinya manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan. Pemahaman tersebut dapat dimanfaatkan oleh praktisi, entitas perusahaan, maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk menyusun langkah strategis dalam upaya pencegahan tindak kecurangan laporan keuangan.

b. Manfaat Akademis

Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi tambahan dalam pengembangan ilmu akuntansi dengan menggunakan teori

agency dan teori *fraud hexagon* sebagai landasan konseptual untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan. Berdasarkan teori *agency*, kecurangan dapat timbul akibat adanya konflik kepentingan antara manajemen sebagai *agent* dan pemangku kepentingan sebagai *principal*. Sementara itu, teori *fraud hexagon* memberikan wawasan dalam mengidentifikasi faktor-faktor seperti tekanan, peluang, rasionalisasi, ego, kapabilitas, dan kolusi yang dapat memicu tindakan kecurangan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.